

**PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE*  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**CHATERINA  
1840050127**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE*  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**CHATERINA  
1840050127**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaterina  
NIM : 1840050127  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force Majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Febuari 2022



Chaterina



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PANDEMI  
COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Oleh:

Nama : Chaterina  
NIM : 1840050127  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Febuari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0327046303

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)  
NIDN: 0317095703

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringgo-ringgo, S.H., M.H)

Dekan



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada 10 Febuari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum, Univesitas Kristen Indonesia, atas nama:


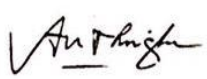

Nama : Chaterina

NIM : 1840050127

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Ketua	
2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.	Anggota	
3. Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M	Anggota	

Jakarta, 10 Febuari 2022



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaterina  
NIM : 1840050127  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam  
Pemutusan Hubungan Kerja

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 10 Februari 2022



Chaterina

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya serta berkat-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul **“PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”** Penelitian ini memuat tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan karena keadaan pandemi *Covid-19* serta perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalaminya.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam proses penulisan skripsi ini banyak menghadapi kendala, namun atas doa, dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H;

4. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H;
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., yang atas ketulusan hati beliau mencurahkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Bapak Anton Nainggolan, S.H., M.H., yang atas ketulusan hati beliau mecurahkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang beliau sampaiam dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
7. Orang tua tercinta Bapak dan Mama penulis, Mindo Banjarnahor, S.H. dan Labora Sitanggung yang penulis sayangi dan hormati yang tidak henti-henti memberikan dukungan moral, doa dan menyiapkan masa depan yang layak bagi penulis.
8. Adik-adik penulis tercinta Felicia, Fatricia dan Yoshandy yang selalu memberikan dukungan, doa, waktu, dan selalu memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Teman-teman penulis : Marcel, Melda, Devia, Ashila, Hendrikus, Echa, Ebi, Anita, Nanda, Firda, Sonya, Melin, Bang Thomas, Bang Mario dan teman-teman yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. UKM Suara Mahasiswa yang menjadi wadah penulis untuk belajar banyak hal baru dalam berorganisasi, penyuluhan masyarakat, advokasi, dan penelitian ilmiah.
11. Pekerja Tata Usaha yang selalu membantu penulis dalam menyemangati dan memberikan solusi untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2018.



Demikian penulis sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk siapa saja yang membacanya dimasa yang akan datang.

Jakarta. 2 Febuari 2022



Chaterina



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Permasalahan .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>6</b>

<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual</b> .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Metode Pendekatan .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TIJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum</b> .....	16
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perjanjian</b> .....	18
1. Teori Perjanjian Menurut Ahli.....	18
2. Syarat Sah Perjanjian .....	19
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	19
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan</b> .....	22
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	22
2. Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	24
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan .....	25
4. Pekerja.....	26
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja</b> .....	27
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian kerja.....	28
3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja.....	28
4. Pengelompokan Perjanjian Kerja.....	29
5. Kewajiban Para Pihak pada Perjanjian Kerja.....	32
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	33
7. Hubungan Kerja .....	34
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)</b> .....	35
1. Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
2. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa atau <i>Force Majeure</i></b> .....	45
1. Pengertian Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) .....	45
2. Unsur-Unsur <i>Force Majeure</i> .....	47
3. Ruang Lingkup <i>Force Majeure</i> .....	48

4.	Macam-Macam <i>Force Majeure</i> .....	48
5.	Akibat <i>Force Majeure</i> .....	49
6.	Pembuktian dalam keadaan memaksa.....	50
<b>BAB III.....</b>		<b>51</b>
<b>PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....</b>		<b>51</b>
<b>A. Sejarah Pandemi Covid-19 .....</b>		<b>51</b>
1.	Pengertian Virus Covid-19.....	51
2.	Covid-19 sebagai Pandemi.....	55
3.	Perkembangan Pandemi Covid-19.....	56
<b>B. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 .....</b>		<b>61</b>
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.....	61
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). .....	64
3.	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019.....	66
4.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional ..	68
5.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Dalam Penanganan Dampak <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).....	71
<b>C. Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.....</b>		<b>73</b>
1.	Kasus Posisi .....	73
2.	Pertimbangan Hukum .....	76
3.	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Jkt.Pst .....	78
4.	Analisis Putusan.....	79
<b>D. Pandemi Covid-19 Sebagai Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja .....</b>		<b>84</b>
<b>BAB IV .....</b>		<b>95</b>

<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PANDEMI <i>COVID-19</i>.....</b>	<b>95</b>
A. Pengaruh Pandemi <i>Covid-19</i> di Indonesia .....	95
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Diputus Hubungan Kerjanya Karena Pandemi <i>Covid-19 (Force Majeure)</i> .....	101
 <b>BAB V.....</b>	 <b>110</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pekerja di-PHK per Oktober 2021.....97**



## DAFTAR SINGKATAN

BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	Corona Virus Disease 19
HAM	Hak Asasi Manusia
ILO	International Labour Organization
KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
MERS	Middle East Respiratory Syndrom
PHK	Pemutusan Sosial Berskala Besar
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
SARS-Cov-2	Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2
TPK	Tingkat Pengganguran Terbuka
UU	Undang-Undang
UUK	Undang-Undang Ketenagakerjaan
WHO	World Health Organization
WNI	Warga Negara Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst .....120





## ABSTRAK

A. Chaterina

B. Fakultas Hukum

C. i-xvii +119 halaman

D. 29 Buku+11Perundang-undangan+1 Putusan

E. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Anthon Nainggolan, S.H., M.H

### **F. PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia diawal tahun 2020 berdampak pada ekonomi sehingga banyak perusahaan harus merumahkan pekerja bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Situasi pandemi tersebut digunakan perusahaan bahwa keadaan pandemi *Covid-19* merupakan keadaan memaksa atau *force majeure*. Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu apakah pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang di-PHK karena pandemi *Covid-19*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, *website* dan sebagainya yang berkaitan dengan *Covid-19*, PHK, dan *force majeure*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan dalam keadaan pandemi *Covid-19* tidak serta merta menjadikan PHK kepada pekerja karena keadaan memaksa atau *force majeure*. PHK tersebut harus dapat dibuktikan oleh perusahaan bahwa pandemi *Covid-19* memberikan pengaruh besar bagi kelangsungan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan PHK kepada pekerja. Pekerja yang mengalami PHK karena pandemi *Covid-19* mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

**Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pandemi Covid-19, dan  
*Force Majeure***

## ABSTRACT

A. Chaterina (1840050127)

B. Faculty of Law

C. i-xvii +119 pages

D. 29 Books + 11 Constitution + 1 Decision

E. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Anthon Nainggolan, S.H., M.H

F. **The Covid-19 Pandemic As The Reason For Force Majeure In  
Work termination Summary** :

*At the beginning of 2020, the world, including Indonesia, was shocked by the corona virus disease 19 or Covid-19. One of the sectors affected by the Covid-19 pandemic is the economic sector. The economic downturn caused many companies to suffer losses, so they had to lay off workers and even terminated their employment or layoffs. Layoffs carried out by companies to workers are generally due to the company's condition which continues to lose money due to the Covid-19 pandemic, but the pandemic situation cannot be used as a company to declare the Covid-19 pandemic as a force majeure situation.*

*This research uses a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The library materials used in this writing are legislation, court decisions, books, journals, websites and so on.*

*The results of this study indicate that layoffs carried out by companies during the Covid-19 pandemic do not necessarily result in layoffs for workers due to force majeure. The layoff must be proven by the company that the Covid-19 pandemic has had a major impact on the company's survival, which has resulted in the company having to lay off workers. Workers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic receive legal protection in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Expert Power, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.*

**Keywords: The Covid-19 Pandemic, Force Majeure, and Termination of Employment**